

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, "Legal Drafting & Good Governance",
Jurnal Keadilan, Vol2. No. 5 Tahun 2002.
- Agus Dwiyanto, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik" Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan ke 3, 2008
- Agus Subagyo, "Reformasi Sistem Rekrutmen Pegawai Negeri di Korea Selatan: Belajar Sistem Meritokrasi dari Negeri Ginseng", <http://bkn.go.id/jrn/litbang/jrunal2.html>, diunduh tanggal 5 Mei 2010
- Andi Yuliani Paris, "Seleksi CPNS dan Pelayanan Publik", <http://www.jakartapress.com/demo/news/id/7402/Seleksi-CPNS-dan-Pelayanan-Publik.jp>, Diunduh tanggal 5 Mei 2010
- Antara News, "CPNS Bengkulu Tak Ikut Tes Bisa Lulus", <http://www.antara.co.id/berita/1259518246/cpns-di-bengkulu-tak-ikut-tes-bisa-lulus>, diunduh tanggal 5 Mei 2010
- Alatas, Syed Hussain "Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi," LP3ES, Jakarta, 1987
- BKN, Formasi Pegawai Negeri Sipil, http://www.bkn.go.id/mgmpns/formasi_pns.htm, diunduh tanggal 12 Februari 2010
- BKN Yogyakarta, "Kiat Jitu terhindar dari Penipuan Lowongan CPNS" <http://bkd.jogjaprovo.go.id/detail/id/article/85>, diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Catatan Kuliahku."Perencanaan SDM"
<http://catatankuliahdigital.blogspot.com/2009/08/perencanaan-sdm.html> diunduh tanggal 15 Mei 2010
- Catatan Kuliahku."Analisa Jabatan"
<http://catatankuliahdigital.blogspot.com/2009/08/analisa-jabatan.html> diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Dedi Syaputra, "Good Governance "

- <http://dedisyaputra.wordpress.com/2008/09/22/good-governance/> diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Depkeu, " Reformasi Birokrasi Ditjen Anggaran, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=84>, 21 Januari 2007
- Digital Mark Reader, "Mengapa scanner DMR paling banyak dipakai di Indonesia?" <http://www.digitalmarkreader.com/news/customer/mengapa-scanner-dmr-paling-banyak-dipakai-di-indon.html>, diunduh tanggal 5 Mei 2010
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, " Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi", Jakarta, Elex Media Komputindo, 2003
- Endah Setyowati, "Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil" <http://bkn.go.id/jrn/litbang/jrunal3.html>, diunduh tanggal 5 Mei 2010
- Eko Prasajo, "Reformasi Kepegawaian (Civil Service Reform) di Indonesia" <http://reformasibirokrasi.habibiecenter.or.id/index.cfm?fuseaction=artikel.detail&id=39&catid=3>
- Fran Dianosa, "Isu KKN tes CPNS" <http://fransdionesa.blogspot.com/2008/12/issu-kkn-tes-pns.html>, di cetak tanggal 14 April 2009
- Fontana, Avanti "Reformasi Birokrasi dan Rekode Perilaku", Investor Daily, 15 Januari 2008
- Gatra Info Service "Korupsi: Menurun atau Kian Canggih," <http://www.gatra.com/II/31/13.html>
- Glendoh, SH "Kejahatan Korupsi," <http://www.petra.ac.id/english/science/social/korup.html>, 1997
- Glynn, Patric et.al (1999) "Globalisasi Korupsi" dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed (1999) "Korupsi dan Ekonomi Dunia," Yayasan Obor-Indonesia, Jakarta

- Harian Mandiri, "Tuntaskan Dugaan Manipulasi CPNS 2005 Samosir", <http://harianmandiri.wordpress.com/2008/06/05/tuntaskan-dugaan-manipulasi-penerimaan-cpns-2005-samosir> . 5 Juni 2008
- Hardjapamekas, Erry Riana "Reformasi Birokrasi: Tantangan dan Peluang", Denpasar 15 Juli 2003
- Hidayat Banjar, "Optimalkan teknologi dalam seleksi CPNS", http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=69848:optimalkan-teknologi-dalam-seleksi-cpns&catid=25:artikel&Itemid=44, diunduh tanggal 5 Mei 2010
- Hukum Online, "Ditolak Jadi PNS, Penyandang Cacat Tempuh Upaya Hukum" <http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=15570&cl=Berita> , 5 Oktober 2006
- Jeddawi, Murtir " Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, & Pembinaan PNS", Kreasi Total Media, 2008
- Jeddawi, Murtir " Karier PNS di Persimpangan Jalan", Gallery Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Johnston, Michael "Pejabat Pemerintah, Kepentingan Swasta, dan Demokrasi Berkelanjutan: Ketika Politik dan Korupsi Bertemu" dalam Elliott, Kimberly Ann, Ed (1999) "Korupsi dan Ekonomi Dunia," Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999
- Kapan Lagi.com, "Menko Kesra Perbolehkan Penyandang Cacat Ikuti Tes CPNS", <http://www.kapanlagi.com/h/0000063910.html> , 18 Mei 2005
- Kariada, "Sejarah Hak Asasi Manusia" <http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejarah-hak-asasi-manusia.html> diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Kendari Ekspres, "Pengawasan CPNSD harus diperketat"17 Desember 2008

- Kian Gie, Kwik (1997) "Korupsi Akar Masalah Defisit Transaksi Berjalan," Kompas Online, <http://www.kompas.com/9709/23/EKONOMI/koru.html>
- Kompas, "Info CPNS: Terkait Manipulasi CPNS", 24 Mei 2008
- Kompas, "Reformasi Birokrasi Tingkatkan Pendapatan Negara", 3 Desember 2008
- Lubis, Mochtar dan Jarnes C. Scott ed. "Bunga Rampai Korupsi," LP3ES, Jakarta, 1998
- Mardiasmo, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Yogyakarta, Andi, 2002
- Masyarakat Transparansi Indonesia, "Membangun Pondasi Good Governance di Masa Transisi," Jakarta, Mei 200
- Moeh "Data Pengaduan Masyarakat " http://puspen.depdagri.go.id/index.php?option=com_farhan&id=67&task=view&title=Moeh&Itemid=58, diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Ni Wayan Dyta Diantari Sejarah Hak Asasi Manusia", <http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/> diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Pandji Santoso, "Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance", Refika Aditama, Bandung, Cetakan pertama, 2008
- Paulus Mujiran, "Harapan pada seleksi CPNS" <http://www.suaramerdeka.com/harian/0411/05/opi3.htm>, 05 Nopember 2004
- Republika, " Rekrutmen CPNS DEPLU, Akhirnya...", 27 Maret 2009
- Riza Nizarli, "Pemberantasan Korupsi Melalui Good Governance, Disampaikan pada Seminar Perkembangan Tindak Pidana Korupsi sebagai Tindak Pidana Khusus, Kerjasama Fakultas Hukum Unsyiah dengan Forum HEDS, Banda Aceh, 7 Oktober 2006

- Safri Nugroho et.all, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi, Depok: Center For Law and Good Governance Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
- Satria, Eddy "Reformasi (Birokrasi) itu Mudah" , Warta Ekonomi Edisi 6 Agustus 2007
- Satya Arinanto, "Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia" Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, Jakarta, 2008
- Sedarmayanti, " Good Governance dan Good Corporate Governance", Mandar Maju, Bandung, 2007
- Sedarmayanti, " Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil", Refika Aditama, 2009
- Setiabudi, "Reformasi Kelembagaan", Bahan Diskusi Kondisi Birokrasi Pemerintah di Bappenas, 1 September 2001
- Sofian Effendi, "Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance" Bahan seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005
- Sofian Effendi, " Reformasi Aparatur Negara untuk Melaksanakan Tata Pemerintahan yang Baik",[http://usupress.usu.ac.id/files/Reformasi%20Birokrasi%20dan%20Korupsi%20di%20Indonesia Final normal bab%201.pdf](http://usupress.usu.ac.id/files/Reformasi%20Birokrasi%20dan%20Korupsi%20di%20Indonesia%20Final%20normal%20bab%201.pdf) diunduh tanggal 15 juni 2010
- Suara Karya, " Rencana Reformasi Birokrasi", 2 Maret 2007
- Suara Karya, "Sistem Rekrutmen PNS sangat buruk" , 18 Juni 2008
- Sudjadnan Parnohadiningrat, "Good Governance Dalam Perspektif Diplomasi Kontemporer", Ceramah kepada Peserta Program Pilihan KRA XXXVII LEMHANNAS Kelompok Departemen Luar Negeri Jakarta, 5 Oktober 2004
- Sukardi, Laksamana "Kalau Korupsi Bersifat Endemik, Perizinan Menjadi Komoditas," LPSI Online,

- <http://www.lpsi.org/analisa/160897/laks.html> (1997)
- Taufiq Effendi, "Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance" Makalah disajikan pada Konsultasi Koordinator Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di lingkungan Departemen Agama Tahun 2006, diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Agama, di Hotel Mambruk Anyer, Serang, Banten, 20 September 2006
- Tempo Interaktif, "Sistem penerimaan CPNS Indonesia 2008, bagaimana selayaknya?" <http://www.tempointeractive.com/ang/min/02/06/nas5.htm> , 22 November 2008
- Theobald, Robin "Corruption, Development and Underdevelopment (Duke University Press, (Durham) 1991
- Toha, Miftah "Reformasi Birokrasi Pemerintah", Bahan Seminar Good Governance di Bappenas, 24 Oktober 2008
- Uni Social Demokrat, "Tap MPR No XI/MPR/1998 dan Lumuran Darah Mahasiswa" http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=490&coid=3&caid=21&gid=2, Diunduh tanggal 10 Desember 2008
- Waspada Online, " Menuju Rekrutmen CPNS berkualitas", 8 September 2008
- Wibisono, Christianto "Defisit Transaksi, Kolusi dan Korupsi," <http://www.suarapembaruan.com/News/1996/12/021296/Headline/hl4/hl4.html>, diunduh tanggal 15 Juni 2010
- Yossi, Dina "Etika Diskriminasi Pekerjaan", <http://dhina-yossie.blogspot.com/2009/01/etika-diskriminasi-pekerjaan.html> , 22 Januari 2009
- Yudi, "Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance ` <http://yudhim.blogspot.com/2008/09/membangun-budaya-birokrasi-untuk-good.html>, diunduh tanggal 15 Juni 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Undang undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 Nopember 2007
- Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 11 Desember 2007
- Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-II/2004 tanggal 22 April 2004
- Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara

Undang Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2007
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M/PAN/7/2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Tenaga Honorer Tahun 2005
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002